

JEPANG DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Oleh: Dra. Yasmis
Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ

Abstrak:

Jepang secara tiba-tiba menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Port Harbour pada tahun 1941. Serangan ini menandai dimulainya Perang Asia Timur Raya dan sekaligus memperlebar medan pertempuran Perang Dunia II yang berpusat di Eropa. Untuk memenangkan perang, Jepang melancarkan ekspansi ke Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun masa pendudukan militer Jepang di Indonesia berakhir pada tahun 1945 setelah dikalahkan pasukan Sekutu pimpinan Amerika Serikat. Tulisan ini mengulas adakah peranan Jepang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda dan mencapai klimaksnya pada 17 Agustus 1945.

Pendahuluan

Penyerahan tanpa syarat Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 dari Jendral Terpoorten kepada Hitoshi Imamura di Kalijati Jawa Barat menyebabkan berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia, dengan demikian Indonesia memasuki sejarah babak baru. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dianggap sebagai masa yang memperhatikan, yang ditandai dengan adanya Romusha dan kelaparan, kekurangan pakaian serta pemaksaan dalam berbagai kegiatan perang.

Setelah Indonesia resmi dibawah pendudukan Jepang ditempatkanlah pasukan angkatan darat dan angkatan laut untuk memerintah Indonesia. Pemerintahan militer Jepang berbeda dengan zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda hanya terdapat satu pemerintahan sipil, namun zaman pendudukan Jepang terdapat tiga pemerintahan militer, yaitu pemerintahan militer angkatan

darat kedua puluh lima untuk wilayah Sumatera dengan pusatnya Bukit Tinggi, angkatan darat keenam belas untuk wilayah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia dan angkatan laut untuk wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur dengan pusatnya di Ujung Pandang. Setiap pemerintahan militer mempunyai kebijakan yang berbeda untuk setiap daerah pendudukan. Pulau Jawa dianggap sebagai tempat yang secara politik paling maju, karena Jawa mempunyai sumber daya manusia yang utama. Hal ini menyebabkan kebijakan Jepang di wilayah Jawa lebih memantapkan kesadaran nasional dari pada kedua wilayah lainnya.

Kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia berkaitan dengan kemenangan peperangan di Pasifik. Pada dasarnya kebijakan yang diterapkan mempunyai dua prioritas. Pertama, menghapuskan pengaruh Barat. Kedua, memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemajuan perang

Jepang. Berbagai mobilisasi dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk membantu pelaksanaannya diangkat pimpinan-pimpinan rakyat baik pemimpin-pemimpin agama, guru dan pemimpin-pemimpin nasionalis. Pemerintah Jepang merangkul pemimpin Islam, karena Jepang menyadari bahwa sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam dan pemimpin Islam mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat. Selain itu pendapat mereka lebih didengar dari pada pendapat priyayi.

“Pada zaman Jepang dengan maksud memobilisasikan penduduk, bahkan para penghulu yang sehari-harinya mengurus soal nikah, talak dan rujuk diharuskan mengikuti latihan. Baru pertama kali itulah para penghulu yang kebanyakan terdiri dari Kyai mendapat pendidikan politik secara resmi”.¹

Selain merangkul pemimpin-pemimpin Islam pemerintah Jepang juga menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasionalis. Tujuannya agar golongan nasionalis mau memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu usaha perang Jepang. Untuk mendapatkan dukungan dan simpati rakyat Indonesia maka tokoh-tokoh nasionalis diangkat menjadi pemimpin pergerakan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang seperti gerkan tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) dan gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat).

Pemerintah pendudukan Jepang memerlukan banyak tenaga untuk pertahanan menghadapi Sekutu. Untuk

itu dibukalah kesempatan bagi para pemuda untuk menjadi prajurit. Gerakan-gerakan pemuda diberi prioritas tinggi dan ditempatkan di bawah pengawasan ketat pihak Jepang. Hal ini dipahami Jepang bahwa untuk mempertahankan kedudukannya harus mendapatkan dukungan dari penduduk setempat.

“Jepang membutuhkan amat banyak tenaga untuk membuat kubu-kubu pertahanan di tepi-tepi pantai, di pegunungan, di hutan-hutan. Di samping itu juga membutuhkan tenaga kerja untuk mempertahankan Indonesia serta daerah-daerah yang sudah dikuasai”.²

Untuk melatih pemuda-pemuda dibentuklah organisasi-organisasi militer seperti Heiho (pasukan pembantu prajurit), Seinendan (barisan pemuda), Keibodan (barisan pembantu polisi), Peta (tentara sukarela pembela tanah air), Fujinkai (perhimpunan wanita), dan Suisyintai (barisan pelopor). Mereka semua diberi latihan dasar yang sama dengan para serdadu Jepang seperti baris berbaris, taktik menggunakan senjata dan taktik berperang.

Setelah Sekutu dapat menguasai dan mendesak tentara Jepang dalam perang Pasifik, maka Jepang mulai banyak memberikan konsesi kepada bangsa Indonesia baik di bidang politik maupun di bidang militer. Dalam bidang politik antara lain berusaha menarik simpati rakyat dengan cara mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih, dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilarangnya pemakaian bahasa Belanda serta adanya

¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995), hal. 26-27

² Sagimun MD, *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Facisme Jepang* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1995), hal. 27

pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai realisasi dari janji kemerdekaan.³ Meskipun tidak berbeda dengan watak kolonialisasi, sistem pemerintahan Jepang juga menerapkan dominasi politik yaitu melarang dan membubarkan pergerakan-pergerakan rakyat juga melakukan eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya bahkan penindasan. Namun demikian ada juga kebijakan politiknya yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dalam bidang militer yaitu adanya pendidikan militer yang diberikan kepada pemuda-pemuda Indonesia, di mana pendidikan militer tersebut sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Politik Jepang

Sebelum menyerbu ke Indonesia pimpinan tentara Jepang (Imamura) telah memahami betul situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Mereka juga memahami tentang semangat kebangsaan Indonesia yang sudah bangkit sejak tahun 1908. Oleh karena itu, maka tentara Jepang berusaha menerapkan kebijakan dengan cara menarik simpati hati rakyat Indonesia terutama para pemimpin-pemimpin pergerakan Indonesia dan pejuang perintis kemerdekaan.

Kebijakan awal yang dilakukan melarang pemakaian Bahasa Belanda

dan Inggris. Pengaruh dari kebijakan itu Bahasa Indonesia tampil ke depan menggantikan kedudukan dan peranan Bahasa Belanda. Sehingga Bahasa Indonesia mengalami perubahan, kemajuan serta perkembangan yang sangat menakjubkan sehingga menuju kedudukan sebagai bahasa resmi negara.

“Maka harus diakui bahwa dimanapun di dunia ini dan pada zaman apapun di dalam sejarah, belum ada bahasa yang begitu cepat pertumbuhannya dan begitu pesat kemajuan serta perkembangan seperti pertumbuhan Bahasa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang”.⁴

Tujuan Jepang melarang memakai Bahasa Belanda dan Inggris tidak lain karena pertimbangan praktis dan semata-mata untuk pengamanan usaha perang. Adanya kesempatan pemakaian Bahasa Indonesia oleh bangsa Indonesia digunakan untuk menggalang persatuan nasional dan memperkokoh rasa kebangsaan dalam jiwa rakyat Indonesia. Digunakannya Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar ternyata juga dapat menambah kecintaan terhadap tanah air, serta mempertinggi derajat bangsa. Kampanye anti Barat yang dilakukan Jepang mendorong penyebaran tentang konsepsi Indonesia di kalangan rakyat. Hal ini secara tidak langsung memperkuat kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk lebih berani menolak kekuatan invasi yang ada di Indonesia untuk menyusun kekuatan dalam rangka membentuk negara nasional yang merdeka dan berdaulat.

Kebijakan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan

³ Sagimun MD, *Jakarta Dari Tepian Air Ke Kota Proklamasi* (Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah, 1988), hal. 455-456

⁴ Ibid, hal. 420

mengumandangkan lagu Indonesia Raya, dilakukan dalam upaya melancarkan propaganda tentara Jepang. Hal ini memberikan pengaruh karena dapat membesarkan hati rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Harapan Indonesia merdeka tentunya membangkitkan nasionalisme yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Diizinkan tiga atribut bernegara, yaitu dikibarkannya bendera merah putih, digunakannya Bahasa Indonesia, dikumandangkannya lagu Indonesia Raya membangkitkan semangat rakyat Indonesia memperoleh kemerdekaan. Meskipun kebijakan tersebut tidak ada niat yang tulus dan ikhlas dari Jepang agar Indonesia merdeka.

Dirangkulnya pemimpin-pemimpin rakyat baik dari kaum nasionalis maupun kaum agama untuk melakukan propaganda Jepang, besar pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan karena mereka berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk menempa semangat kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Jepang banyak memberikan konsesi-konsesi kepada golongan Islam seperti diberikan izin menerbitkan majalah, izin mengadakan pertemuan-pertemuan serta dikeluarkannya perintah agar priyayi memberikan bantuan kepada pemimpin-pemimpin Islam. Ini berarti posisi Islam jauh melebihi elit priyayi. Hal ini mempengaruhi perkembangan-perkembangan selanjutnya sampai pada tingkat yang istimewa. Para pemimpin Islam dipercayakan beberapa tanggung jawab di administrasi pusat dan daerah untuk urusan keagamaan mereka juga ikut berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk mempersiapkan orang-orang Islam bagi

pembebasan negaranya dan agamanya. Manfaat lain dari kerjasamanya dengan Jepang, yaitu diperolehnya posisi yang kuat dan memberikan prestise sosial yang baik, yang lebih penting lagi adalah prestise organisator Islam mampu mempertahankan identitasnya sampai akhir masa pendudukan.⁵

Tokoh nasionalis yang dirangkul adalah mereka yang berhaluan non kooperasi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Jepang menyadari pentingnya kerjasama yang erat terutama dengan Bung Karno dan Bung Hatta yang merupakan pemimpin terkemuka pada saat itu. Sebaliknya pemimpin-pemimpin Indonesia memperoleh manfaat untuk kepentingan cita-cita kemerdekaan yang selalu mereka perjuangkan. Pemimpin-pemimpin nasionalis mengambil sikap yang berbeda dalam strategi perjuangannya. Ada pemimpin yang menolak kerjasama dengan Jepang seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifudin; ada juga yang bersedia kerjasama dengan Jepang seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Namun mereka saling melengkapi dan bahu membahu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta bersedia bekerjasama dengan perhitungan-perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan politik. Menurut perhitungan dan pertimbangan kerjasama dengan tentara Jepang, mereka akan mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya untuk memacu dan mempercepat proses perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka. Mereka

⁵ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: PT. Pustaka Jaya, 1990), hal. 234-244

mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk menggembelng semangat nasionalisme dan menggelorakan cita-cita kemerdekaan serta mempersiapkan rakyat Indonesia baik fisik maupun mental untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka bekerja keras dan berpacu dengan waktu dalam mempersiapkan rakyat Indonesia baik fisik maupun mental untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Dalam beberapa kesempatan tokoh-tokoh itu dapat memanfaatkan tugas-tugas mereka ketika berkeliling berpidato di depan massa. Kesempatan itu digunakan untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada setiap pemuda dan orang Indonesia”.⁶

Pemimpin nasionalis yang duduk dalam PUTERA menggunakan PUTERA sebagai ujung tombak untuk mengerahkan seluruh potensi rakyat Indonesia. Banyak organisasi yang menyatakan bergabung dengan PUTERA karena kepopuleran Bung Karno seperti: Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Pengurus Besar Istri Indonesia dan Barisan Banteng. Kesempatan emas ini digunakan Bung Karno sebaik-baiknya untuk menghimpun kekuatan massa. Aspirasinya disampaikan melalui rapat-rapat raksasa dan kampanye keliling.

“Sukarno menyatakan “untuk mencapai cita-cita masa datang harus memadukan rokh semangat rakyat, agar masa datang gemilang; kesempatan ikut bekerja dan berkorban ini telah ada pada kita;

marilah ambil kesempatan ini dengan kegembiraan rokh dan semangat menyala-nyala”.⁷

Pergerakan PUTERA ternyata lebih menguntungkan perjuangan rakyat dari pada usaha membantu perang Jepang. Akhirnya pergerakan tersebut dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk Jawa Hokokai (Perhimpunan kebaktian rakyat) dengan penasehat utama Bung Karno dan Hasyim Ashari. Dari kesempatan ini Bung Karno mengambil keuntungan dengan memanfaatkan tamasya propaganda bagi Hokokai untuk memperkokoh posisinya sebagai pemimpin utama kekuatan rakyat. Setelah kekalahan Jepang di Saipan pada bulan Juli 1944, perhatian yang diberikan kepada wilayah Indonesia tidaklah seketat seperti yang diberikan pad awal pendudukan. Konsesi untuk Indonesia lebih banyak diberikan. Salah satu dari konsesi itu adalah adanya janji kemerdekaan, namun Jepang tidak menentukan tanggal kemerdekaan tersebut. Harapan Jepang agar bangsa Indonesia akan membalas janji tersebut dengan cara mendukung Jepang sebagai ungkapan rasa terima kasih. Untuk mewujudkan janji itu dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan itu dibentuk karena Jepang tidak mempunyai harapan lagi untuk mempertahankan kekuasaan, karena pasukannya disapu bersih oleh Sekutu di Teluk Leyte. Di samping itu, perasaan takut menghantui Jepang setelah adanya pemberontakan Peta di Blitar dan berbaliknya angkatan bersenjata Birma menyerang Jepang

⁶ Cahyo Budi Utomo. Mpd, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekan* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hal 202

⁷ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 128

dan bergabung dengan sekutu. Ditambah lagi hilangnya sejumlah kapal angkut dan kapal perang Jepang dalam peperangan dengan Sekutu. Badan Penyelidik terdiri dari 67 orang dengan ketuanya K. R. T. Radjiman Widiyodiningrat. Kehadiran Bung Karno sebagai anggota dinyatakan lebih bermanfaat karena beliau dapat turut serta secara aktif menyumbangkan buah pikiran dan berdiskusi. Pengaruh kebijakan ini sangat besar karena BPUPKI menjadi wadah bermusyawarah tokoh-tokoh nasional dalam mempersiapkan Indonesia merdeka. Kesempatan ini tidak disia-siakan karena selain melakukan penyelidikan tentang kemerdekaan juga berusaha menyusun undang-undang dasar dan dasar negara Indonesia. Undang-undang dasar yang disusun terdiri atas tiga bagian, yaitu: pembukaan, batang tubuh dan penjelasan resmi. Ciri utama undang-undang dasar yang disusun adalah:

- Mengenai suatu pemerintahan yang kuat
- Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
- Pemerintah dibentuknya dan bertanggungjawab terhadapnya
- Adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA)⁸

Sedangkan dasar negara yang dibentuk adalah dasar negara Pancasila yang berjiwa kekeluargaan. Melalui badan BPUPKI disusun pula bentuk negara Republik kesatuan dengan sistem presidential. Untuk menyelesaikan dan mengesahkan

rancangan undang-undang dasar dibentuk suatu badan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Selain mengesahkan, PPKI mempunyai tugas untuk memusyawarahkan serta memutuskan tentang cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Anggota-anggota PPKI tidak hanya terdiri dari pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dari Pulau Jawa saja, akan tetapi mewakili dari seluruh tanah air. Badan ini beranggotakan 21 orang yang diketuai Bung Karno. PPKI yang dibentuk Jepang itu kemudian diambil alih oleh pemimpin-pemimpin Indonesia ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Badan inilah yang kemudian melaksanakan pembentukan Indonesia merdeka, yaitu dengan mengambil langkah-langkah untuk membentuk sebagian lembaga yang ditetapkan dalam undang-undang dasar, seperti pengangkatan presiden dan wakil, membentuk KNI, membentuk departemen-departemen, membentuk badan keamanan rakyat serta membagi wilayah Indonesia menjadi 8 daerah propinsi.

Manfaat lain dari kebijakan Jepang dalam politik, yaitu diangkatnya tokoh-tokoh Indonesia untuk menduduki jabatan penting seperti: *Chuo Sangi In* (Dewan Penasehat Pusat), *Sumubo* (Departemen Urusan Umum), *Naimubu* (Departemen Dalam Negeri), dan lain-lain. Hal ini merupakan kesempatan baik karena orang-orang Indonesia dilibatkan dalam urusan-urusan pemerintahan. Ini adalah pengalaman berharga untuk mempersiapkan diri dalam kepemimpinan bernegara.

Pengaruh Kebijakan Militer

Awal pendudukan Jepang, Indonesia sudah dianggap mempunyai

⁸ J. D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Syahrir* (Jakarta: PT. Temprint, 1993), hal. 177

sumber daya manusia yang potensial terutama di Jawa. Langkah yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Jepang adalah membuat kebijakan agar wilayah yang diduduki takluk tanpa menggunakan kekerasan tetapi dengan cara memobilisasi massa. Dalam memobilisasi pemuda dan rakyat dimanfaatkan golongan nasionalisme dan pemimpin Islam. Mobilisasi dilakukan dengan memberikan pendidikan dan latihan semi militer dan militer dengan tujuan menyiapkan tenaga cadangan bagi kepentingan perang Jepang dalam menghadapi Sekutu. Program pendidikan militer yang dijalankan Jepang berlandaskan dua asumsi dasar. Pertama adalah semangat (*Sishin*) yang merupakan hal penting pada persenjataan militer, dan kedua adalah disiplin mutlak yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai lain.⁹

Bangsa Indonesia mengikuti pendidikan dan latihan militer merupakan keuntungan besar karena mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman militer baik secara strategi tulang punggung dalam upaya perjuangan bahkan mempertahankan kemerdekaan. Mahasiswa-mahasiswa muda Indonesia yang direkrut Jepang dalam kemiliteran sebagian besar adalah mereka yang sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan untuk memasuki karier militer, sehingga mereka tidak menganggap dirinya sebagai militer profesional. Keterikatan mereka bukan pada karier, tetapi pada kemerdekaan Indonesia. Memobilisasi pemuda dalam latihan semi militer dan kemiliteran telah membawa perubahan-perubahan besar dalam

mentalitas pemuda. Dengan adanya semangat Jepang ditambah latihan yang besar dan didapatnya pengalaman-pengalaman kolektif serta realitas kehidupan rakyat yang menyedihkan menyebabkan munculnya keberanian para pemuda untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan. Dapat dikatakan pendudukan Jepang merupakan masa yang penuh ambivalensi yakni terjadi proses menguatnya perasaan nasionalisme di tengah proses mobilisasi pemuda untuk kepentingan Jepang. Bahkan telah terjadinya penyimpangan rencana dalam upaya mobilisasi pemuda karena pada akhirnya justru memberikan keuntungan secara mentalis dan psikologis bagi bangsa Indonesia. Selain itu juga mendorong rakyat memiliki keberanian dan sikap mental untuk menentang penjajah.

Keuntungan nyata dari bentuk-bentuk organisasi yang merupakan implikasi dari mobilisasi antara lain terdidiknya kurang lebih dua juta pemuda-pemuda Indonesia dalam bidang militer, ini didapatkan antara lain dalam organisasi *Seinendan* tercatat 500.000 orang, yang duduk di dalamnya nasionalisme muda seperti: Sukarni dan Latief Hendradiningrat, *Keibodan* memiliki satu juta orang, *Heiko* sebanyak 42.200 pemuda, *Suisyintai* beranggotakan 80.000 orang, *Jibakutai* tercatat 60.000 orang baik di kota maupun di desa, *PETA* terdiri dari 69 batalyon dengan jumlah anggota 37.950 orang di wilayah Jawa dan 20.000 orang di Sumatera, *Hizbullah* dan *Fisabilillah* sekitar 50.000 orang.

Di antara organisasi militer, yang paling berarti adalah organisasi militer PETA. Manfaat yang dapat dipetik dari pembentukan PETA adalah timbulnya

⁹ Joyce C. Lebra, *Tentara Gemblengan Jepang*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 181

inspirasi bagi anggota PETA, sebab dengan latihan-latihan militer yang berat memperkuat rasa percaya diri dan menumbuhkan perasaan harga diri yang sepadan dengan bangsa lain. Adanya kesempatan ini dapat direalisasikan dalam bentuk solidaritas bersama guna menciptakan diri sebagai bangsa yang merdeka. PETA juga merupakan wadah bagi penggemblengan mental dan nasionalisme pemuda yang akhirnya berperan penting dalam revolusi kemerdekaan. Sebagaimana diutarakan oleh seseorang jenderal Indonesia.

"Jepang telah mengganjar kami sesuatu yang jauh lebih penting dari pada apa yang pernah diajarkan Belanda kepada kami, yakni: Bagaimana membangun sebuah tentara dari nol."¹⁰

Pendidikan kemiliteran yang diberikan Jepang telah mempercepat pergerakan kebangsaan Indonesia menuju negara nasionalisme dan merdeka. Jepang juga memberi sumbangan langsung pada perkembangan-perkembangan untuk revolusi di Indonesia karena mereka mengindoktrinasi, melatih dan mempersenjatai banyak dari generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin rakyat untuk menjalin hubungan dengan rakyat. Sehingga saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia walaupun Jepang telah menjanjikan akan kemerdekaan kepada Indonesia, namun hari dan tanggalnya belum ditetapkan.

Latihan kemiliteran yang diperoleh pemuda sangat bermanfaat dalam rangka pembentukan badan keamanan rakyat setelah Indonesia

merdeka. Karena unsur-unsur yang ada dalam badan keamanan rakyat antar lain dari PETA, Heiho, Keisatsutai (kesatuan polisi), Seinndan dan lainnya. Di samping unsur darat, dalam BKR terdapat pula unsur-unsur laut dan udara. BKR penjaga pantai merupakan unsur dari Kaigun, heiho, dan jawatan-jawatan pelayaran sedangkan BKR udara berasal dari unsur Rikugun dan Kaigun. Melalui proses yang kontinyu BKR berkembang menjadi ABRI yang dikenal sekarang.¹¹

Keuntungan yang didapat tidak hanya pendidikan militer tetapi juga persenjataan dari kesatuan polisi Jepang (Keisasutai) karena persenjataan mereka tidak dilucuti pada awal kemerdekaan. Jepang tidak melucuti senjata mereka karena polisi sebagai alat penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak dilibatkan di dalam perang. Dengan dibekali oleh semangat juang yang tinggi dan ditopang oleh kemampuan militer yang diberikan Jepang, maka saat terjadinya *Vacuum of Power*, rakyat Indonesia bangkit untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan tentara pendudukan Jepang. Senjata yang dimiliki dari Keisatsutai itu dijadikan modal untuk mendobrak gudang-gudang senjata Jepang dan angkatan muda telah mendahului mengambil alih kekuasaan di kantor-kantor yang dipimpin oleh bangsa Jepang serta melucuti tentara-tentara Jepang.¹²

¹⁰ Ibid, hal. 181

¹¹ Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit* (Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1985), hal. 36-38

¹² Hardi, *Meningkatkan Kesadaran Nasional* (Jakarta: PT. Mufti Harun, 1988), hal. 118

Daftar Pustaka

- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. Jakarta: PT. Pustaka Jaya.
- Cahyo Budi Utomo. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Hardi. 1988. *Meningkatkan Kesadaran Nasional*. Jakarta: PT. Mufti Harun.
- Jong, L. D. Penyunting Arifin Bey. 1987. *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- _____. 1986. *Ungkapan-ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Lebra, Joyce C. 1988. *Tentara Gemblengan Jepang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Legge, J. D. 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Syahrir*. Jakarta: PT. Temprint.
- M. D, Sagimun. 1985. *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Facisme Jepang*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- _____. 1988. *Jakarta dari Tepian Air ke Kota Proklamasi*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.